

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, ctk. I, Kencana, Jakarta, 2012.
- Adam Ilyas, S. H. *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, Depok, 2024.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Malang, 2001.
- Andi Sofyan, S. H., Et Al. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Awaloedin Djamin, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Kriminologi UI, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, ctk. V, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2000.
- Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, ctk. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Kementerian ESDM, *Profil Energi Indonesia 2023*, KESDM, Jakarta, 2023.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994.

- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, ed. I, ctk. III, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cipta Karya, Bogor, 1995.
- Rocky Marbun, S. H., Et Al. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana: Membongkar Tindak Tuturan Dan Komunikasi Instrumental Aparat Penegak Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2021.
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Kombinasi*, ctk. I, Alfabeta, Bandung, 2011.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman & Ismunarto Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

### **Jurnal**

- Alfian, Elvi. Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020.
- Amin, Rahman & Al Aziz, Muhammad Fikri. Penguatan Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri. *Krtha Bhayangkara*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Anindia, Islamia Ayu & Sularto, R. B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Anisa, Mega, et al. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Solar Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/Lh/2022/Pn.Tjk). *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23, No. 2, 2024.
- Aulia, Aisyah, et al. Dinamika Ekonomi Politik dalam Regulasi BBM: Studi Kasus Pengoplosan Pertamina di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 11, 2025.
- Biroli, Alfian. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum). *Dimensi: Journal of Sociology*, Vol. 8, No. 2, 2015.
- Dewantoro, Basmal. *Analisis Yuridis Urgensi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*. 2024. Phd Thesis. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Fitriliana, Fitriliana, Et Al. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Hukum Terhadap Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana Di Indonesia. *Journal Of Law And Government Science*, 2025, 11.1: 7-10.
- Hamaminata, Gani. Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2023, 2.4: 52-64.
- Hasan, Julian Muhammad. Dampak Pencabutan Subsidi BBM bagi Keuangan Negara Indonesia dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Renaissance*, Vol. 3, No. 1, 2018.

- Hutabarat, Samuel P. Subsidi Energi dan Dampaknya terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Muntaha, Maria. Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 2017, 29.3: 461-473.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin; Samud, Samud. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integreted Criminal Justice System) Menurut Kuhap. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2022, 7.1: 149-160.
- Putra, Boy Muhammad; Ardiansah; & Bagio Kadaryanto. Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. *JAPS: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rahardjo, S. Penyalahgunaan Teknologi Informasi dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2020.
- Ramadhan, Adindha Oktaviani, et al. Aspek Hukum Pidana dalam Kasus Oplosan BBM: Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 5, 2025.
- Sahudi, Muhammad Aksah; Balla, Herman; & Ambarwati, Auliah. Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 2, 2023.
- Sahyana, Yana. Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Konstituen*, 2020, 2.2: 75-87.
- Sihaloho, Tiara Miranda Br, et al. Analisis Yuridis Tindak Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi. *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- Sitompul, Ozi Suhendra & Lubis, Syaddan Dintara. Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Penimbunan dan Penjualan BBM Bersubsidi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Sofian, Ahmad. Penguatan Kapasitas Jaksa Melalui Koordinasi Dalam Proses Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Ruu Kuhap: Studi Perbandingan

- Amerika Serikat, Belanda Dan Indonesia. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 2025, 6.2: 183-217.
- Sosiawan, Ulang Mangun. Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Pre-Judicial Construction Through Judicial Reconstruction Of The Jommissioner Judges In Order To Protect Rights Of Suspects/Defendants In Indonesia's Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum P-Issn*, 2018, 1410: 5632.
- Sulistiono, Dany. Peran Hukum dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi BBM Bersubsidi. *Berajah Journal*, Vol. 4, No. 11, 2025.
- Surya, Reni, et al. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Syamsul Huda. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Udin, Muhammad, et al. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Subsidi oleh Pemerintah. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 8, No. 1, 2024.
- Ulfa, Maulida, et al. Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap Inflasi dan Implikasinya terhadap Makroekonomi di Indonesia. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, Vol. 2, No. 3, 2022.
- Waskito, Achmad Budi. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 2018, 1.1: 287-304.

### **Skripsi dan Disertasi**

- Andi Syahril, Andi Syahril. *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. 2022. Phd Thesis. Universitas Batanghari.
- Hiariej, Edward Omar Sharief; Sh, M. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2016.

- Mada, M. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM yang Disubsidi Pemerintah (Studi Kasus Putusan No. 06-K/Pm III-16/Ad/XII/2017). Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2019.
- Nashruddin, Ammar. Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Premanisme. Disertasi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- Novrian, Primadana. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat. Disertasi, Universitas Andalas, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum positif utama yang mengatur seluruh tahapan proses peradilan pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, atau Terpencil.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyaluran, Pengawasan, dan Pengendalian BBM Bersubsidi

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 24 ayat (1) yang mengatur kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan prinsip-prinsip dasar peradilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur kewenangan penuntut umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar kewenangan penyidik.

Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Jaksa Agung, sebagai pelengkap dalam praktik penegakan hukum acara pidana.

### **Data Elektronik/Internet**

jogja.polri.go.id. *Polda DIY Amankan Satu Tersangka Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar*. Polda Tribrata News Online, 13 Juni 2025. Terdapat dalam <https://jogja.polri.go.id/polda/tribrata-news/online/detail/polda-diy-amankan-satu-tersangka-kasus-penyalahgunaan-bbm-bersubsidi-jenis-bio-solar.html>. Diakses tanggal 13 Juni 2025

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan AKP. Yuli Hermawan, S.H., M.H. selaku KANIT 1 SUBDIT 4/Tipider Ditreskrimsus Polda DIY di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2025.

Wawancara dengan Bapak Hario Duto Pamungkas, S.I.K. AKBP PLT, selaku Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 20 Juli 2025.